



KEPALA DINAS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PPROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S.F. HARIYANTO
Jabatan : Plt. Gubernur Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Riau



S.F. HARIYANTO

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Riau



Hj. FARIZA, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Standar	Persentase Pelaksanaan PUG sesuai Standar	52,93
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	74,96
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	10,05
3	Terkendalinya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan serta Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	67,93
		Total Fertility Rate (TFR)	2,17 Rata-Rata Anak Per Wanita
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 19.936.107.494,00	APBD PROVINSI RIAU
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 189.637.514,00	APBD PROVINSI RIAU
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp 382.196.350,00	APBD PROVINSI RIAU
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 49.427.162,00	APBD PROVINSI RIAU
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 22.475.380,00	APBD PROVINSI RIAU
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 184.721.084,00	APBD PROVINSI RIAU
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 377.242.000,00	APBD PROVINSI RIAU
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp 60.549.000,00	APBD PROVINSI RIAU
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 23.590.000,00	APBD PROVINSI RIAU
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Rp 133.629.616,00	APBD PROVINSI RIAU
	TOTAL	Rp 21.359.575.600,00	

Pekanbaru, Januari 2026





SEKRETARIAT

DINAS



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU**

SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EFIA NURITA, SE., MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

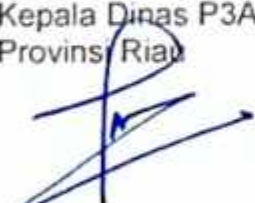
Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau


Hj. Fariza, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
Sekretaris,


Efia Nurita, SE., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19711116 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT

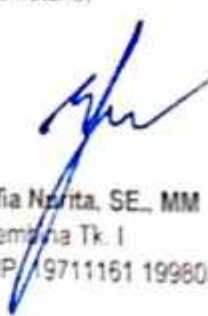
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
		Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan Standar Kerja	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau	Rp 19.936.107.494
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 46.846.800
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 46.846.800
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Rp 18.097.858.030
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 18.097.858.030
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 603.972.988
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 19.906.788
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 325.173.218
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 63.019.000
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 27.734.348
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 168.139.634
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 850.372.176
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 259.722.968
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 590.649.208
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 337.057.500
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 210.590.000
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 33.450.000
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.467.500
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 32.550.000
	TOTAL	Rp 19.936.107.494

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Provinsi Riau,


 Hj. FARIZA, SH, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661225 198701 2 003

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,
 Sekretaris,


 Efia Nurita, SE., MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19711161 199603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRIDAL, S.Kom
Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : EFIA NURITA, SE, MM
Jabatan : Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Hj. FARIZA, SH, MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


EFIA NURITA, SE, MM
NIP. 19711116 199803 2 001

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,


SYAFRIDAL, S.Kom
NIP. 19750925 200904 1 001


Mengetahui,
Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH, MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Merencanakan kegiatan subbagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan subbagian Perencanaan dan Evaluasi	12 Dokumen
2	Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing – masing bidang agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Usulan Rencana Program dan Kegiatan dari Bidang - Bidang	32 Dokumen
3	Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Unit Kerja, Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra, RKT, RKPD, LKjIP dan Perjanjian Kinerja	9 Dokumen
4	Melaksanakan koordinasi penyusunan administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Administrasi SOP	6 Dokumen
5	Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis	Jumlah Dokumen bahan bahan rapat koordinasi perencanaan	2 Dokumen
6	Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Perencanaan Program dalam rangka perbaikan kinerja pada masa mendatang	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan tugas	6 Dokumen
7	Membuat laporan pelaksanaan tugas di subbagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas	13 Dokumen
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kompetensi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan tugas dibagian Perencanaan dan Program	27 Dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
9	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 46.846.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 46.846.800
2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 93.017.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 60.467.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 32.550.000
TOTAL		Rp. 139.864.300

Pihak Kedua,


EFLA NURITA, SE, MM
 NIP. 19711116 199803 2 001

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,


SYAFRIDAL, S.Kom
 NIP. 19750925 200904 1 001

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,


Hj. FARIZA, SH, MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINA SASRI MEGAWATI, S.STP, M.Si
Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : EFIA NURITA, SE, MM
Jabatan : Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Hj. FARIZA, SH, MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.


Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


EFIA NURITA, SE, MM
NIP. 19711116 199803 2 001

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,


DINA SASRI MEGAWATI, S.STP, M.Si
NIP. 19940220 201609 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga,


Hj. FARIZA, SH, MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Merencanakan kegiatan subbagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan subbagian Perencanaan dan Evaluasi	12 Dokumen
2	Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing – masing bidang agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Usulan Rencana Program dan Kegiatan dari Bidang - Bidang	32 Dokumen
3	Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Unit Kerja, Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra, RKT, RKPD, LKjIP dan Perjanjian Kinerja	9 Dokumen
4	Melaksanakan koordinasi penyusunan administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Administrasi SOP	6 Dokumen
5	Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis	Jumlah Dokumen bahan bahan rapat koordinasi perencanaan	2 Dokumen
6	Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Perencanaan Program dalam rangka perbaikan kinerja pada masa mendatang	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan tugas	6 Dokumen
7	Membuat laporan pelaksanaan tugas di subbagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas	13 Dokumen
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kompetensi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan tugas dibagian Perencanaan dan Program	27 Dokumen

Pihak Kedua,


EFIA NURITA, SE, MM
 NIP. 19711116 199803 2 001

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,


DINA SASRI MEGAWATI, S.STP, M.Si
 NIP. 19940220 201609 2 001

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,


Hj. FARIZA, SH, MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



BIDANG PPKG



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau

Hj. FARIZA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PPKG

BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M M
Penata Tk. I
NIP. 19870827 201102 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Standar	Persentase Pelaksanaan PUG sesuai Standar	52,93
2	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	12
3	Meningkatnya pemanfaatan Data Gender dan Anak (DGA) dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	48
4	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49,31

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 189.637.514
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp 91.896.730
	a. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp 43.155.730
	b. Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Rp 48.741.000
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp 69.086.996
	a. Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dibidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp 69.086.996
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 28.653.788
	a. Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 28.653.788

II	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	49.427.162
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp	49.427.162
a.	Penguatan Kerjasama antar Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rp	22.935.220
b.	Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rp	26.491.942
III	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	22.475.380
1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Rp	22.475.380
a.	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp	22.475.380
TOTAL		Rp	261.540.056


Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau



Hj. FARIZA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PPKG



BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M M
Penata Tk. I
NIP. 19870827 201102 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFAH LISA DARATI, MSi

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : Hj. FARIZA,SH.MH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19870827 201102 2 003

Pihak Pertama,

SYARIFAH LISA DARATI, M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19780908 201102 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Riset dan Analisis Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah Riset dan Analisis Kebijakan yang telah disusun	3 Dokumen (Ringkasan Kebijakan/Laporan hasil pemantauan)
2	Terlaksananya pembuatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang telah disusun	3 Dokumen (Ringkasan/Policy Paper)
3	Terlaksananya komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen (Surat Penugasan/Daftar Konsultasi hasil konsultasi)
4	Melaksanakan Publikasi Hasil Kajian Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen Hasil Kajian yang dipublikasikan	1 Dokumen (Artikel Kebijakan)

Pihak Kedua,



BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M
 NIP. 197870827 201102 2 003

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,



SYARIFAH LISA DARATI, M.Si
 NIP. 19780908 201102 2 001

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,



HJ. FARIZA, SH, MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUMALASARI,SH.I.MH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : Hj. FARIZA,SH.MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19870827 201102 2 003

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,

KUMALASARI,SH.I.MH
Pembina

NIP. 19771119 200604 2 003

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA,SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Riset dan Analisis Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah Riset dan Analisis Kebijakan yang telah disusun	3 dokumen (Ringkasan Kebijakan/Laporan hasil pemantauan)
2	Terlaksananya pembuatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang telah disusun	3 Dokumen (Ringkasan/Policy Paper)
3	Terlaksananya komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen (Surat Penugasan/Daftar Konsultasi hasil konsultasi)
4	Melaksanakan Publikasi Hasil Kajian Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Jumlah Dokumen Hasil Kajian yang dipublikasikan	1 Dokumen (Artikel Kebijakan)

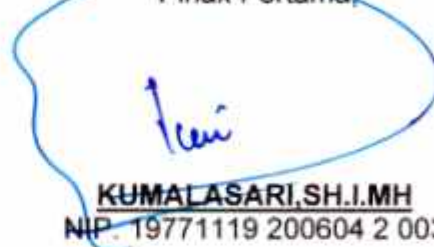
Pihak Kedua,



BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M
 NIP. 19870827 201102 2 003

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,



KUMALASARI, SH.I.MH
 NIP. 19771119 200604 2 003

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,



H. FARIZA, SH.MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



BIDANG KTKPHA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. FARIZA, SH, MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

Hj. FARIZA, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,

ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 201001 2 015

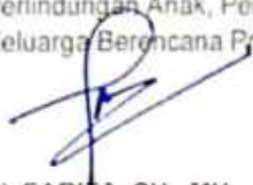
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	74,96
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,29

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 184.721.084
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp 49.225.200
	a. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp 49.225.200
2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 135.495.884
	a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Rp 60.937.340
	b. penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 74.558.544
	TOTAL	Rp 184.721.084

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Provinsi Riau,



Hj. FARIZA, SH., MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19661226 198701 2 003

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
 Pemenuhan Hak Anak,



Anahartini Ropaniputri, SE, MM
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790603 201001 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. ANGGI WAHYUNI, S.Kep, M.K.M
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Hj. FARIZA, SH, MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Ketiga,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 201001 2 015

Pihak Pertama,

Ns. ANGGI WAHYUNI, S.Kep, M.K.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19870616 201102 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

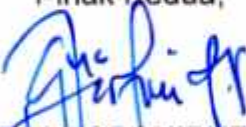
Hj. FARIZA, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 198701 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU**

**BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan Riset dan Analisis Kebijakan di Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen Ringkasan Kebijakan dan Telaahan Staf yang terkumpul	6 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan rekomendasi kebijakan dalam Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak agar memperlancar penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen Rancangan Rekomendasi/Policy Paper dan Telaahan Staf yang terencana, terkoordinasi, terfasilitasi dan terevaluasi	3 Dokumen
3	Mengadakan penelitian/pengamatan berdasarkan permasalahan Komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan di Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen Surat Penugasan, Daftar Kosultasi dan Hasil Konsultasi, serta laporan Advokasi Kebijakan yang diteliti/diamati	6 Dokumen
4	Membuat laporan berdasarkan hasil Publikasi hasil Kajian kebijakan terkait Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah dokumen Artikel Kebijakan yang dilaporkan	1 Dokumen
5	Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan terkait Program dan Kegiatan pada Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah dokumen Juklak/Juknis yang disusun/dikembangkan	2 Dokumen

Pihak Kedua,



ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
NIP. 19790603 201001 2 015

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,



Ns. ANGGI WAHYUNI, S.Kep, M.K.M
NIP. 19870616 201102 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH, MH
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESSY RAHMAWATI, S.Psi
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

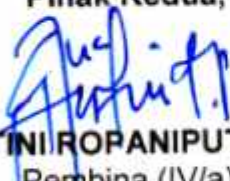
Nama : Hj. FARIZA, SH, MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Ketiga,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,


ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 201001 2 015

Pihak Pertama,


DESSY RAHMAWATI, S.Psi
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19810619 201102 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga,


Hj. FARIZA, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 198701 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU**

**BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan Riset dan Analisis Kebijakan di Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen Ringkasan Kebijakan dan Telaahan Staf yang terkumpul	7 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan rekomendasi kebijakan dalam Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak agar memperlancar penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen Rancangan Rekomendasi/Policy Paper dan Telaahan Staf yang terencana, terkoordinasi, terfasilitasi dan terevaluasi	3 Dokumen
3	Mengadakan penelitian/pengamatan berdasarkan permasalahan Komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan di Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen Surat Penugasan, Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi, serta laporan Advokasi Kebijakan yang diteliti/diamati	12 Dokumen
4	Membuat laporan berdasarkan hasil Publikasi hasil Kajian kebijakan terkait Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak untuk disampaikan kepada pimpinan unitagar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah dokumen Artikel Kebijakan yang dilaporkan	1 Dokumen
5	Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan terkait Program dan Kegiatan pada Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah dokumen Juklak/Juknis yang disusun/dikembangkan	2 Dokumen

Pihak Kedua,


ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
NIP. 19790603 201001 2 015

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,


DESSY RAHMAWATI, S.Psi
NIP. 19810619 201102 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga,


Hj. FARIZA, SH, MH
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARINAWATI, S.AP
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Hj. FARIZA, SH, MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Ketiga,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 201001 2 015

Pihak Pertama,

ARINAWATI, S.AP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710208 199803 2 005

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 198701 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU**

**BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan Riset dan Analisis Kebijakan di Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen Ringkasan Kebijakan dan Telaahan Staf yang terkumpul	7 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan rekomendasi kebijakan dalam Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak agar memperlancar penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen Rancangan Rekomendasi/Policy Paper dan Telaahan Staf yang terencana, terkoordinasi, terfasilitasi dan terevaluasi	3 Dokumen
3	Mengadakan penelitian/pengamatan berdasarkan permasalahan Komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan di Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen Surat Penugasan, Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi, serta laporan Advokasi Kebijakan yang diteliti/diamati	12 Dokumen
4	Membuat laporan berdasarkan hasil Publikasi hasil Kajian kebijakan terkait Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah dokumen Artikel Kebijakan yang dilaporkan	1 Dokumen
5	Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan terkait Program dan Kegiatan pada Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah dokumen Juklak/Juknis yang disusun/dikembangkan	2 Dokumen

Pihak Kedua,


ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
NIP. 19790603 201001 2 015

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,


ARINAWATI, S.AP
NIP. 19710208 199803 2 005

Mengetahui,
Pihak Ketiga,


Hj. FARIZA, SH, MH
NIP. 19661226 198701 2 003



BIDANG PHPKA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU**

BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Asfeni, S.Kep, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau

Hj. Fariza, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PHPKA,

Ns. Asfeni, S.Kep, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710624 199101 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk PTPPO	10,05
2	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	74,96
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Khusus Anak secara Komprehensif	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	83,90
4	Meningkatnya Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I	Program Perlindungan Perempuan	Rp 247,977,350
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 148,264,550
	a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Rp 148,264,550
2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 99,712,800
	a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp 69,360,000
	b. pendampingan penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Rp 30,352,800
	TOTAL	Rp 247,977,350

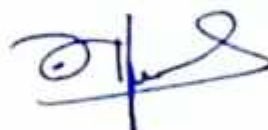
Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Provinsi Riau.



Hj. FARIZA, SH., MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
 Khusus Anak,



Ns. Asfeni, S.Kep., M.Kes
 Pembina
 NIP. 19710624 199101 2 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAPUANI MUHAJIR, S.Ag
Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang PHP dan KA
Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau


Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
Dinas P3AP2KB Provinsi Riau


SAPUANI MUHAJIR, S.Ag
Pembina / IV a
NIP. 19730101 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan Bahan- bahan Dinas P3AP2KB sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Bahan yang dikumpulkan	3 Dokumen
2	Melaksanakan Proses mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan- bahan sesuai dengan Dinas P3AP2KB dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang telah dibuat	3 Dokumen
3	Melaksanakan Penelitian/ Pengamatan berdasarkan permasalahan Dinas P3AP2KB dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah Komunikasi, Koordinasi Advokasi, Konsultasi dan Negosiasi Kebijakan yang telah dilakukan	3 Dokumen
4	Membuat Laporan berdasarkan hasil Dinas P3AP2KB untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah Hasil Kajian Kebijakan yang telah di Publikasikan	3 Dokumen

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau


Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
Dinas P3AP2KB Provinsi Riau


SAPDANI MUHAJIR, S.Ag
Pembina / IV a
NIP. 19730101 200003 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEFFY MAY AYU, SKM
Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PHPKA,

Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19710624 199101 2 001

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
Bidang PHP dan KA

DEFFY MAY AYU, SKM
Penata Tk. I / III d
NIP. 19830521 200501 2 003

Pihak Ketiga,

HJ. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyediakan Dokumen Perencanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah dibuat	2 Dokumen Perencanaan
2	Melaksanakan Kajian dan Analisa Kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Jumlah Dokumen Kajian dan analisa kebijakan yang telah dibuat	1 Dokumen Ringkasan Kebijakan
3	Melaksanakan Analisa Kebijakan dan Advokasi terkait Program/ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Analisa Kebijakan yang telah dibuat	1 Dokumen Analisa
4	Melaksanakan Analisis dan Advokasi pelaksanaan program kegiatan DRPPA/RBI	Jumlah Dokumen Hasil analisis dan advokasi yang telah dibuat	1 Dokumen Hasil

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PHPKA,



Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19710624 199101 2 001

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli
Pertama Bidang PHP dan KA



DEFFY MAY AYU, SKM
Penata Tk. I / III d
NIP. 19830521 200501 2 003

Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI CHAIRIN HUSNA, S.IP., M.Tr. I.P
Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PHPKA,

Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19710624 199101 2 001

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
Bidang PHP dan KA

DWI CHAIRIN HUSNA, S.IP., M.Tr. I.P
Penata Tk. I/III d
NIP. 19910718 201206 2 001

Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah dibuat	2 Dokumen Perencanaan
2	Melaksanakan kajian dan analisa kebijakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi kebijakan yang telah dibuat	1 Dokumen Rekomendasi Kebijakan
3	Melaksanakan Analisa Kebijakan dan advokasi Program/Kegiatan Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Analisa Kebijakan	1 Dokumen Analisa
4	Melaksanakan analisis dan advokasi terkait pelaksanaan Anak memerlukan Perlindungan Khusus dan Perkawinan Anak	Jumlah Dokumen Hasil analisis dan advokasi yang telah dibuat	2 Dokumen Hasil

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PHPKA,



Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Pembina Tk. II/IV.b
NIP. 19710624 199101 2 001

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
Bidang PHP dan KA



DWI CHAIRIN HUSNA, S.IP., M.Tr. I.P.
Penata Tk. I / III d
NIP. 19910718 201206 2 001

Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFAH KHAIRIANI, S.Kom., MM
Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PHPKA,

Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Pembina Tk. II/IV.b
NIP. 19710624 199101 2 001

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
Bidang PHP dan KA

SYARIFAH KHAIRIANI, S.Kom., MM
Pembina IV.a
NIP. 19771127 200312 2 006

Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meyediakan Dokumen Perencanaan Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Perencanaan KTP dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah dibuat	1 Dokumen Perencanaan
2	Melaksanakan Analisa Kebijakan dan Advokasi Pencegahan KTP dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Analisa Kebijakan yang telah dibuat	3 Dokumen Ringkasan Kebijakan
3	Melaksanakan Kajian dan Analisa Kebijakan dengan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Jumlah Dokumen Kajian dan analisa kebijakan yang telah dibuat	1 Dokumen Analisa
4	Melaksanakan Komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan kebijakan di Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak di Dinas P3AP2KB Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan	1 Dokumen Hasil

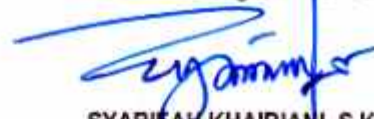
Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PHPKA,



Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19710624 199101 2 001

Pihak Pertama,
Fungsional Analis Kebijakan Ahli
Pertama Bidang PHP dan KA



SYARIFAH KHAIRIANI, S.Kom., MM
Pembina / IV a
NIP. 19771127 200312 2 006

Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003



BIDANG PPKB



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI YANI, S.Si. Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau

Hj. Fariza, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PPKB,


Fitri Yani, S.Si. Apt
Pembina Tingkat I
NIP. 19770216 200312 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertilty Rate (TFR)	2,17
2	Meningkatnya sinergitas dan peran lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	70,76
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan KB Modern	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	87,10
4	Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 - 19 tahun	ASFR	14,78
5	Meningkatnya pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	MKJP	22,3

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I	Program Pengendalian Penduduk	Rp 60,549,000
1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp 60,549,000
a.	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Rp 19,070,000
b.	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Rp 41,479,000
II	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 23,590,000
1	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 23,590,000
a.	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Rp 23,590,000
	TOTAL	Rp 84,139,000

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Provinsi Riau,


 Hj. FARIZA, SH., MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661226 198701 2 003

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana,


 Fitri Yanti, S.Si, Apt
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770216 200312 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUSPA RIANA, S.Si, Apt
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : FITRI YANI. S.SI, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FITRI YANI. S.SI, Apt
NIP. 19770216 200312 2 007

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,

PUSPA RIANA, S.Si, Apt
NIP. 19770410 200604 2 003

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Pengembangan substansi teknis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen
2	Tersusunnya Pengembangan Rencana Kerja Strategis dan Operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen
3	Terselenggaranya Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Kegiatan	12 Dokumen
4	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah Dokumen Kegiatan	4 Dokumen
5	Terselenggaranya disemenisasi substansi teknis pengaturan program Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Substansi Program	3 Substansi
6	Terlaksananya kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah kegiatan kemitraan	1 Kegiatan
7	Terselenggaranya tugas di Lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban kinerja dan pertimbangan pimpinan	Jumlah Laporan yang dikordinasikan	4 Laporan
8	Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga Berencana	Jumlah Laporan yang dikordinasikan	2 Laporan
9	Terselenggaranya Kegiatan GDPK	Jumlah Laporan	1 Laporan
10	Terselenggaranya Kegiatan SSK	Jumlah Laporan	1 Laporan

Pihak Kedua,



FITRI YANI, S.Si, Apt
 NIP. 19770216 200312 2 007

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,



PUSPA RIANA, S.Si, Apt
 NIP. 19770410 200604 2 003

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH, MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDYA PUTRI HASTIN, S.IP, M.Si
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : FITRI YANI. S.SI, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FITRI YANI. S.SI, Apt
NIP. 19770216 200312 2 007

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,

WIDYA PUTRI HASTIN, S.IP, M.Si
NIP. 19930629 201507 2 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Pengembangan substansi teknis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen
2	Tersusunnya Pengembangan Rencana Kerja Strategis dan Operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen
3	Terselenggaranya Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Kegiatan	12 Dokumen
4	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah Dokumen Kegiatan	4 Dokumen
5	Terselenggaranya disemenisasi substansi teknis pengaturan program Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Substansi Program	3 Substansi
6	Terlaksananya kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah kegiatan kemitraan	1 Kegiatan
7	Terselenggaranya tugas di Lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban kinerja dan pertimbangan pimpinan	Jumlah Laporan yang dikordinasikan	4 Laporan
8	Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga Berencana	Jumlah Laporan yang dikordinasikan	2 Laporan
9	Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama dengan Stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah kegiatan Fasilitasi	1 Kegiatan

Pihak Kedua,



FITRI YANTI, S.SI, Apt
 NIP. 19770216 200312 2 007

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,



WIDYA PUTRI HASTIN, S.IP, M.Si
 NIP. 19930629 201507 2 002

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH, MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANSARULLAH, SH
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : FITRI YANI. S.SI, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FITRI YANI. S.SI, Apt
NIP. 19770216 200312 2 007

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,

ANSARULLAH, SH
NIP. 19680616 199403 1 004

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Pengembangan substansi teknis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen
2	Tersusunnya Pengembangan Rencana Kerja Strategis dan Operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen
3	Terselenggaranya Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Kegiatan	6 Dokumen
4	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah Dokumen Kegiatan	2 Dokumen
5	Terselenggaranya disemenisasi substansi teknis pengaturan program Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Substansi Program	1 Substansi
6	Terlaksananya kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah kegiatan kemitraan	1 Kegiatan
7	Terselenggaranya tugas di Lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban kinerja dan pertimbangan pimpinan	Jumlah Laporan yang dikordinasikan	2 Laporan
8	Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga Berencana	Jumlah Laporan yang dikordinasikan	1 Laporan
9	Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama dengan Stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah kegiatan Fasilitasi	1 Kegiatan

Pihak Kedua,



FITRI YANI, S.SI, Apt
NIP. 19770216 200312 2 007

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,



ANSARULLAH, SH
NIP. 19680616 199403 1 004

Mengetahui,
Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH, MH
NIP. 19661226 198701 2 003



BIDANG KSDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAVITRI HANDAYANI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,

SAVITRI HANDAYANI, SE
NIP. 197909052002122005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	68,50
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	33.13
		Indeks Lansia Berdaya	62.11

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp133.629.616,00
1	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp116.576.416,00
	a Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	Rp23.054.000,00
	b Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp22.794.800,00
	c Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Rp70.727.616,00
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp17.053.200,00
	a Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Rp17.053.200,00
	Total	Rp133.629.616,00

Pihak Kedua,



Hj. FARIZA, SH. MH
 NIP. 19661226 198701 2 003

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,



SAVITRI HANDAYANI, SE
 NIP. 197909052002122005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESI SUSANTI, SKM, M.Si
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : SAVITRI HANDAYANI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


SAVITRI HANDAYANI, SE
NIP. 197909052002122005



DESI SUSANTI, SKM, M.Si
NIP. 197912042003122002

Mengetahui,
Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen
2	Menyusun pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan yang diklasifikasi	2 Dokumen
3	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang dianalisa	12 Dokumen
4	Melaksanakan Pembinaan , fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah penyusunan dokumen	12 Dokumen
5	Menyelenggarakan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Subtansi Program	4 Subtansi Program
6	Melaksanakan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Keluarga Berencana	Jumlah hasil analisa	3 Kegiatan
7	Menyelenggarakan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah hasil analisa	1 Dokumen
8	Melaksanakan tugas di lingkungan Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kinerja dan pertimbangan pimpinan	Jumlah laporan yang dikoordinasikan	4 Subtansi

Pihak Kedua,



SAVITRI HANDAYANI, SE
 NIP. 197909052002122005

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,



DESI SUSANTI, SKM, M.Si
 NIP. 197912042003122002

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,



HL. FARIZA, SH, MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASLELI, SE
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : SAVITRI HANDAYANI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua,**

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga,**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama.**

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

SAVITRI HANDAYANI, SE
NIP. 197909052002122005

ASLELI, SE
NIP. 197104062000032011

Mengetahui,
Pihak Ketiga

Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

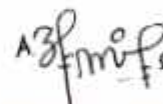
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen
2	Menyusun pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan yang diklasifikasi	2 Dokumen
3	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang dianalisa	12 Dokumen
4	Melaksanakan Pembinaan , fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah penyusunan dokumen	12 Dokumen
5	Menyelenggarakan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Subtansi Program	4 Subtansi Program
6	Melaksanakan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Keluarga Berencana	Jumlah hasil analisa	3 Kegiatan
7	Menyelenggarakan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah hasil analisa	1 Dokumen
8	Melaksanakan tugas di lingkungan Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kinerja dan pertimbangan pimpinan	Jumlah laporan yang dikoordinasikan	4 Subtansi

Pihak Kedua,



SAVITRI HANDAYANI, SE
 NIP. 197909052002122005

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,



ASLELI, SE
 NIP. 197104062000032011

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH. MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOFRELTA, SE, M.Kes
Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : SAVITRI HANDAYANI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua,**

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga,**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama.**

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


SAVITRI HANDAYANI, SE
NIP. 197909052002122005

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,


NOFRELTA, SE, M.Kes
NIP. 196808181990032002

Mengetahui,
Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen
2	Menyusun pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan yang diklasifikasi	2 Dokumen
3	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen yang dianalisa	12 Dokumen
4	Melaksanakan Pembinaan , fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah penyusunan dokumen	12 Dokumen
5	Menyelenggarakan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Subtansi Program	4 Substansi Program
6	Melaksanakan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Keluarga Berencana	Jumlah hasil analisa	3 Kegiatan
7	Menyelenggarakan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah hasil analisa	1 Dokumen
8	Melaksanakan tugas di lingkungan Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kinerja dan pertimbangan pimpinan	Jumlah laporan yang dikoordinasikan	4 Substansi

Pihak Kedua,



SAVITRI HANDAYANI, SE
 NIP. 197909052002122005

Pekanbaru, Januari 2026
 Pihak Pertama,



NOFRELTA, SE, M.Kes
 NIP. 196808181990032002

Mengetahui,
 Pihak Ketiga,



Hj. FARIZA, SH, MH
 NIP. 19661226 198701 2 003



UPTD

PPA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU**

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. FARIZA, SH., MH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas P3AP2KB
Provinsi Riau

Pihak Pertama,
Kepala UPT PPA Provinsi Riau

Hj. Fariza, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003


Sri Nismala Dewi, SKM.
Penata Tk. I
NIP.19770725 200312 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk PTPPO	10,05
2	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	74,96
3	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	83,90
4	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Khusus Anak secara Komprehensif	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I	Program Perlindungan Perempuan	Rp 134.219.000
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 134.219.000
	a. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 134.219.000
II	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 377.242.000
2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 377.242.000
	a. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 140.602.000
	b. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 236.640.000
	TOTAL	Rp 511.461.000

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau,

Hj. FARIZA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak



SRI NISMALA DEWI, SKM
Penata Tk. I
NIP. 19770725 200312 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU**

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KATERINA SUSANTI, SKM., M.Kes.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA Provinsi Riau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala UPT PPA
Provinsi Riau


Sri Nismala Dewi, SKM.
Penata Tk. I
NIP. 19770725 200312 2 009

Pihak Pertama,
Kasubbag Tata Usaha


Katerina Susanti, SKM., M.Kes.
Penata
NIP. 19750620 200501 2 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU**

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIN RAFIDA, S.Psi., MM.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala UPT PPA
Provinsi Riau

Sri Nismala Dewi, SKM.
Penata Tk. I
NIP.19770725 200312 2 009

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Lanjut

Iin Rafida, S.Psi., MM.
Penata Tk. I
NIP. 19810305 201102 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU**

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI SAMANTHA, SIP.,M.A.P.
Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan UPT PPA Provinsi Riau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala UPT PPA
Provinsi Riau

Sri Nismala Dewi, SKM.
Penata Tk. I
NIP.19770725 200312 2 009

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengaduan

Hendri Samantha, SIP.,M.A.P.
Penata Tk. I
NIP. 19880406 200701 1 004